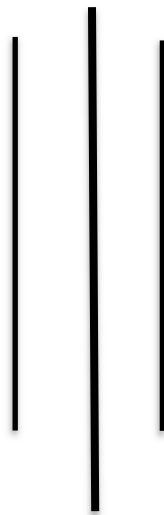




# **RENCANA KERJA (RENJA)**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
TAHUN 2025**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2025**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2025 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2025.

Kepala Dinas Kependudukan  
Dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Pemalang



Drs. HENDRO SUSILO, M.AP  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681227 199001 1 002

## KATA PENGANTAR

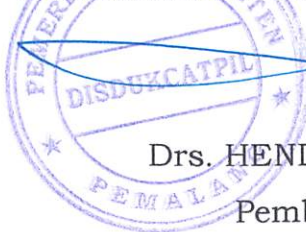
Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang telah menyelesaikan Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan kinerja SKPD yang sesuai dengan sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen ini telah mengacu pada RPMJD Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna untuk itu kami berharap agar Rencana Kerja (Renja) ini pada akhirnya dapat direalisasikan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sekaligus berkontribusi terhadap upaya-upaya peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang sangat kami harapkan.

Pemalang, Juli 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG



Drs. HENDRO SUSILO, M.AP

Pembina Tingkat I

NIP. 19681227 199001 1 002

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
-	
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II    HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	
<b>    TAHUN 2023 .....</b>	<b>10</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun	
2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	29
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
Perangkat Daerah .....	31
2.4 Review Terhadap RKPD Tahun 2025 .....	43
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....	52
<b>BAB III  TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>54</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	54
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	56
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	57
<b>BAB IV  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..</b>	<b>59</b>
<b>BAB V    PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian.....	74
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	74
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	75
<b>LAMPIRAN .....</b>	

## DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Pemalang	12
2.	Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Disdukcatpil Kabupaten Pemalang	30
3.	Tabel 2.3	Review terhadap RKPD Tahun 2025	44
4.	Tabel 2.4	Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	53
5	Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Disdukcatpil Kabupaten Pemalang Tahun 2025	57
6..	Tabel 4.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Disdukcatpil Kabupaten Pemalang Tahun 2025.	63

## DAFTAR GAMBAR

1.1	Bagan Alur Penyusunan Renja Disdukcapil Kabupaten Pematang Tahun 2025	3
1.2	Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	4

## **“V. RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa diwajibkan bagi setiap perangkat daerah untuk menyusun perencanaan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Renja perangkat daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcatpil) Kabupaten Pemalang Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai

dengan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025. Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran Renstra Disdukcapil Kabupaten Pemalang yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Disdukcapil Kabupaten Pemalang melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD Tahun 2025. Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kinerja Disdukcapil Kabupaten Pemalang mengingat :

1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan Disdukcapil Kabupaten Pemalang dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi acuan bagi Disdukcapil Kabupaten Pemalang untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan pada bidang administrasi kependudukan; dan
4. Secara faktual, merupakan salah satu instrumen evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Disdukcapil Kabupaten Pemalang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Disdukcapil Kabupaten Pemalang Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

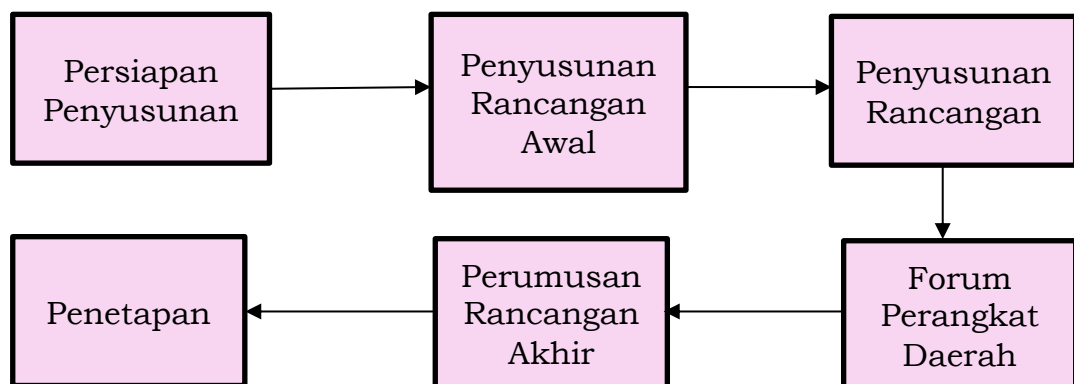
1. Persiapan penyusunan
  - Pembentukan Tim Penyusun Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang Tahun 2025
  - Pengumpulan materi (hasil evaluasi renja Tahun 2023, pengendalian kegiatan Tahun 2023, dan RKPD Tahun 2025)
2. Penyusunan rancangan awal
  - Koordinasi dengan Bidang di Disdukcapil Kabupaten Pemalang



- Desk dengan pengampu kegiatan
3. Penyusunan rancangan
    - Sinkronisasi oleh Tim Penyusun Renja Disdukcatpil Kabupaten Pemalang Tahun 2025
    - Masukan dari pelaksana kegiatan di Disdukcapil Kabupaten Pemalang
  4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
    - Melaksanakan FGD dengan mengundang : BPS, Pengadilan Agama, Kemenag, Dinpermasdes, Bappeda, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa dan Pemangku Kepentingan yang terkait
  5. Perumusan rancangan akhir
    - Penyempurnaan oleh Tim Penyusun Renja Disdukcatpil Kabupaten Pemalang Tahun 2025
    - Diverifikasi oleh Bappeda
  6. Penetapan
    - Bersama dengan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Renja Disdukcatpil Kabupaten Pemalang Tahun 2025



Renja Disdukcatpil Kabupaten Pemalang Tahun 2025 adalah penjabaran dari Renstra Disdukcatpil Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025 serta mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025.



- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  - 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  - 12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah,

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang 5 Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang;
  29. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  30. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
  31. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) di Kabupaten Pemalang;
  32. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
  33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  34. Peraturan Bupati Pemalang Nomor xxx Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang adalah untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Tahun 2025 berdasarkan penjabaran dari Renstra Disdukcapil Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di Disdukcapil Kabupaten Pemalang;

2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA Disdukcatpil Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan dokumen Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Hasil Evaluasi Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang Tahun 2023, berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dan capaian Renstra Disdukcapil Kabupaten Pemalang, analisis kinerja pelayanan Disdukcapil Kabupaten Pemalang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Pemalang, penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat.
3. Bab III Tujuan dan Sasaran Disdukcapil Kabupaten Pemalang, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Disdukcatpil Kabupaten Pemalang, program, kegiatan dan sub kegiatan.
4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Disdukcapil Kabupaten Pemalang, berisi tentang kerangka pendanaan Tahun 2025 serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Disdukcapil Kabupaten Pemalang.
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA DISDUKCATPIL**  
**KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disdukcatpil Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dan Capaian Renstra Disdukcatpil Kabupaten Pemalang**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Renstra Disdukcapil Kabupaten Pemalang. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2023 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di Disdukcapil Kabupaten Pemalang pada Tahun 2023 dan estimasi Tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:



### Tahun Anggaran 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang pada Tahun 2023 mendapatkan Alokasi Anggaran setelah perubahan sebesar Rp11.041.738.000,00 dengan melaksanakan 5 program, 14 kegiatan dan 45 sub kegiatan, sementara realisasi keuangan Tahun 2023, sebesar Rp 10.585.415.317 ,00 atau sebesar 95,87%

### Tahun Anggaran 2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang pada Tahun 2024 mendapatkan Alokasi Anggaran Penetapan sebesar Rp9.180.653.800,00 dengan melaksanakan 5 program, 15 kegiatan dan 43 sub kegiatan, sementara realisasi keuangan sampai triwulan II Tahun 2024, sebesar Rp 3.928.075.564,00. atau sebesar 42,79 %

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2023, Disdukcapil Kabupaten Pematang telah melaksanakan seluruh program yang berjumlah 5 (lima) yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pengelolaan Profil Kependudukan, 14 (lima belas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan. Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan tersebut capaian realisasinya sudah mencapai 100 % sehingga statusnya masuk kategori Sangat Tinggi (ST). Adapun realisasi kinerja secara terperinci sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah  
s/d Tahun 2024 Kabupaten Pematang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>										
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>IKM</b>	<b>indeks</b>	<b>81</b>	<b>79,00</b>	<b>80</b>	<b>87,06</b>	<b>108,83</b>	<b>81</b>	<b>92,60</b>	<b>114,32</b>
		<b>Cakupan layanan administrasi kependudukan</b>	<b>%</b>	<b>86,20</b>	<b>77,10</b>	<b>81,65</b>	<b>84,92</b>	<b>104,00</b>	<b>86,20</b>	<b>85,99</b>	<b>99,75</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										
		<b>Nilai SAKIP</b>	<b>skor</b>	<b>59</b>	<b>63,70</b>	<b>57,00</b>	<b>63,70</b>	<b>111,75</b>	<b>59</b>	<b>65,47</b>	<b>110,97</b>
		<b>Nilai IRB</b>	<b>skor</b>	<b>76</b>	<b>0,00</b>	<b>74,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										
	<b>Keluaran</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun</b>	<b>dokumen</b>	<b>43</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100</b>	<b>11</b>	<b>43</b>	<b>100</b>
	<b>Hasil</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	10	4	2	2	100	3	9	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen	4	2	1	1	100	1	4	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	dokumen	4	2	1	1	100	1	4	100,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	dokumen	4	2	1	1	100	1	4	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	dokumen	4	2	1	1	100	1	4	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen	4	2	1	1	100	1	4	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	13	6	3	3	100	4	13	100,00
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										
	<b>Keluaran</b>	<b>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun</b>	<b>dokumen</b>	<b>104</b>	<b>52</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>100</b>	<b>26</b>	<b>104</b>	<b>100,00</b>
	<b>Hasil</b>	<b>Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	56	28	14	14	100	14	56	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	dokumen	4	2	1	1	100	1	4	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	dokumen	45	22	11	11	100	12	45	100,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	dokumen	4	2	1	1	100	1	4	100,00
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>										
	<b>Keluaran</b>	<b>Jumlah pegawai yang meningkat kapasitasnya</b>	<b>orang</b>	<b>228</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>228</b>	<b>100,00</b>
	<b>Hasil</b>	<b>Persentase pegawai yang meningkat kapasitasnya</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	orang	228	144	0	0	0	84	228	100,00
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										
	<b>Keluaran</b>	<b>Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia</b>	<b>Paket</b>	<b>510</b>	<b>273</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>100</b>	<b>61</b>	<b>510</b>	<b>100,00</b>
	<b>Hasil</b>	<b>Persentase ketersediaan layanan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	22	13	7	7	100	3	22	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	26	13	13	13	100	0	26	100,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	36	23	8	8	100	5	36	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	59	10	36	36	100	13	59	100,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	41	21	10	10	100	10	41	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	134	72	60	60	100	2	134	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	192	122	42	42	100	28	192	100,00
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										
	<b>Keluaran</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang tersedia</b>	<b>unit</b>	<b>152</b>	<b>93</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>100</b>	<b>26</b>	<b>152</b>	<b>100,00</b>
	<b>Hasil</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang tersedia tepat waktu</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	77	29	24	24	100	24	77	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	64	57	7	7	100	0	64	100,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	11	7	2	2	100	2	11	100,00
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										
	<b>Keluaran</b>	<b>Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia</b>	<b>Laporan</b>	<b>288</b>	<b>144</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>100</b>	<b>72</b>	<b>288</b>	<b>100,00</b>
	<b>Hasil</b>	<b>Persentase Ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	48	24	12	12	100	12	48	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	192	96	48	48	100	48	192	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	48	24	12	12	100	12	48	100,00



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										
	<b>Keluaran</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang terpelihara</b>	<b>unit</b>	<b>561</b>	<b>314</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>100</b>	<b>116</b>	<b>561</b>	<b>100,00</b>
	<b>Hasil</b>	<b>Persentase ketersediaan barang milik daerah yang terpelihara.</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	144	72	36	36	100	36	144	100,00
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	unit	11	5	4	4	100	2	11	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	351	208	78	78	100	65	351	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	7	4	2	2	100	1	7	100,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	48	24	12	12	100	12	48	100,00
	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase kepemilikan dokumen kependudukan</b>	<b>%</b>	<b>86,20</b>	<b>84,92</b>	<b>81,65</b>	<b>84,92</b>	<b>104,00</b>	<b>86,20</b>	<b>84,36</b>	<b>97,87</b>
	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>										
	<b>Keluaran</b>	<b>Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan</b>	<b>dokumen</b>	<b>322.648</b>	<b>128.824</b>	<b>104.412</b>	<b>104.412</b>	<b>100</b>	<b>89.412</b>	<b>322.648</b>	<b>100,00</b>
	<b>Hasil</b>	<b>Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai ketentuan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	dokumen	265.000	100.000	90.000	90.000	100	75.000	265.000	100,00
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Laporan	48	24	12	12	100	12	48	100,00
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa	Jumlah dokumen pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan	dokumen	57.600	28.800	14.400	14.400	100	14.400	57.600	100,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Kependudukan	peristiwa kependudukan									
	<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>										
	<b>Keluaran</b>	<b>Jumlah dokumen penataan pendaftaran penduduk yang disediakan</b>	<b>dokumen</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>100,00</b>
	<b>Hasil</b>	<b>Persentase dokumen penataan pendaftaran penduduk yang disediakan tepat waktu dan sesuai ketentuan.</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain Blangko KTP-EL, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	Dokumen	4	2	1	1	100	1	4	100,00
	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>										
	<b>Keluaran</b>	<b>Jumlah dokumen penyelenggaraan pendaftaran kependudukan yang diterbitkan.</b>	<b>Dokumen</b>	<b>21.600</b>	<b>10.800</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>100</b>	<b>5.400</b>	<b>21.600</b>	<b>100,00</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	<b>Hasil</b>	<b>Persentase jumlah layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang tersedia.</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Dokumen	21.600	10.800	5.400	5.400	100	5.400	21.600	100,00
	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil</b>	<b>%</b>	<b>98,50</b>	<b>98,25</b>	<b>98,38</b>	<b>99,53</b>	<b>101,17</b>	<b>98,50</b>	<b>99,63</b>	<b>101,15</b>
	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>										
	<b>Keluaran</b>	<b>Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan</b>	<b>dokumen</b>	<b>128.006</b>	<b>64.002</b>	<b>32.002</b>	<b>32.002</b>	<b>100</b>	<b>32.002</b>	<b>128.006</b>	<b>100,00</b>
	<b>Hasil</b>	<b>Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai ketentuan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	dokumen	128.000	64.000	32.000	32.000	100,00	32.000	128.000	100,00
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	Layanan	6	2	2	2	100	2	6	100,00
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama</b>	<b>%</b>	<b>71,79</b>	<b>41,03</b>	<b>56,41</b>	<b>56,41</b>	<b>100</b>	<b>71,79</b>	<b>64,10</b>	<b>89,28</b>
	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>										
	<b>Keluaran</b>	<b>Jumlah dokumen pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan yang disusun.</b>	<b>dokumen</b>	<b>72</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>100</b>	<b>18</b>	<b>72</b>	<b>100,00</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	<b>Hasil</b>	<b>Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama.</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	dokumen	48	24	12	12	100	12	48	100,00
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan	dokumen	24	12	6	6	100	6	24	100,00
	<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>										
	<b>Keluaran</b>	<b>Jumlah dokumen penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang disusun.</b>	<b>dokumen</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>100,00</b>
	<b>Hasil</b>	<b>Persentase peraturan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang implementatif</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	jumlah dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang disusun	dokumen	4	1	1	1	100	1	4	100,00
	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>										
	<b>Keluaran</b>	<b>Jumlah laporan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang disusun.</b>	<b>Laporan</b>	<b>132</b>	<b>62</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>100,00</b>	<b>38</b>	<b>132</b>	<b>100,00</b>
	<b>Hasil</b>	<b>Persentase jenis data kependudukan yang dikelola sesuai ketentuan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah dikabupaten/kota dalam penerbitan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Laporan	24	12	6	6	100	6	24	100,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Laporan	54	24	12	12	100	18	54	100,00
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Laporan	48	24	12	12	100	12	48	100,00
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	Laporan	6	2	2	2	100	2	6	100,00
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Data yang mutakhir</b>	<b>%</b>	<b>95</b>	<b>93</b>	<b>94</b>	<b>100</b>	<b>106,38</b>	<b>95</b>	<b>95,85</b>	<b>100,89</b>
	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>										
	<b>Keluaran</b>	<b>Jumlah dokumen profil kependudukan yang tersusun</b>	<b>dokumen</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>100,00</b>
	<b>Hasil</b>	<b>Persentase dokumen profil kependudukan yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan.</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data kependudukan kabupaten/kota	dokumen	4	2	1	1	100	1	4	100,00



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	dokumen	4	2	1	1	100	1	4	100,00

Berdasar tabel 2.1 di atas, terlihat bahwa capaian kinerja Program Tahun 2023 sudah melebihi target seperti yang tertuang/ ditentukan dalam Renja 2023 maupun Renstra 2021-2026 yang berarti realisasinya sudah di atas 100 % dengan status Sangat Tinggi (ST). Lima program yang sudah dilaksanakan melebihi target atau di atas 100 % yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator SAKIP, Program Pendaftaran Penduduk dengan indikator Persentase kepemilikan dokumen kependudukan, Program Pencatatan Sipil dengan indikator Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan indikator Persentase Data Kependudukan yang mutakhir. Demikian juga untuk tingkat capaian realisasi 14 (Lima belas) kegiatan dan 45 (Empat puluh lima) sub kegiatan yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang kesemuanya sudah memenuhi target yang ditentukan sehingga bisa mencapai 100 % dengan status Sangat Tinggi (ST).

Tercapainya realisasi kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dikarenakan:

1. Komitmen pemimpin di Disdukcapil Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan tupoksinya cukup tinggi;
2. Adanya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan.

Hal-hal yang perlu dilakukan ke depan adalah :

1. Komitmen pimpinan yang tinggi dan konsisten untuk selalu melaksanakan tupoksi secara optimal tetap harus dijaga karena adanya beberapa kali mutasi/pergeseran jabatan;
2. Meningkatkan kuantitas SDM ASN yang semakin berkurang karena purna tugas.

3. Meningkatkan kapasitas SDM karena tantangan dinamika pembangunan dan pelayanan publik sangat dinamis sehingga diperlukan inovasi dan kreatifitas untuk meningkatkan kinerja Disdukcapil Kabupaten Pematang Jaya;
4. Tetap konsisten mengawal ketercapaian program/kegiatan/sub kegiatan melalui evaluasi dokumen, pengendalian kegiatan dan SPIP ;
5. Meningkatkan kualitas SPIP
6. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan adminduk ;
7. Koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dinas/ instansi terkait, kecamatan, pemerintahan desa.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Pematang Jaya**

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya yang telah ditetapkan dan indikator pelayanan lainnya. IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Capaian kinerja pelayanan Disdukcapil Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2023 dan 2024 serta proyeksi Tahun 2025 dan 2026, dapat disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan**  
**Sipil**  
**Kabupaten Pemalang**

No.	Indikator	Sa tuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Penerbitan akta perkawinan	%	-	-	V	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Penerbitan akta perceraian	%	-	-	V	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Penerbitan akta kematian	%	-	-	V	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Penyajian data kependudukan	%	-	-	V	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Perekaman KTP-el	%	-	-	V	99,90	99,91	99,92	99,93	99,95	98,86	99,92	99,93	
6	Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA	%	-	-	V	35	40	45	50	51,38	44,78	45	50	
7	Tingkat kepemilikan akta kelahiran	%	-	-	V	93,50	94	94,50	95	98,12	94,22	94,50	95	
8	Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	-	0	V	56,41	71,79	87,18	100	56,41	41,03	87,181	100	
9	Persentase kepemilikan kartu keluarga	%	-	-	-	98,55	98,60	98,65	98,70	99,93	99,85	98,65	98,70	
10	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	Indeks	-	v	-	80	81	82	83	87,06	83,83	82	83	
11	Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	-	v	-	81,65	86,20	90,75	94,66	84,20	80,19	90,75	94,66	
12	SAKIP	Nilai	-	-	-	57	59	61	63	63,70	65,47	61	63	
13	IRB	Indeks	-	-	-	74,00	76	78	80	0	0	78	80	
14	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	-	-	-	77,82	79,50	81,19	82,88	83,75	81,16	81,19	82,88	
15	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	-	-	-	98,38	98,50	98,63	98,75	99,53	98,56	98,63	98,75	
16	Persentase data kependudukan yang mutakhir	%	-	-	-	94	95	96	97	100	100	96	97	

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi

kependudukan, yang diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat dan Cakupan layanan administrasi kependudukan yang diukur dari rerata dari persentase kepemilikan dokumen kependudukan, persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil, persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama, persentase peningkatan kualitas informasi kependudukan.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil Kabupaten Pematang**

Disdukcapil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan. Disdukcapil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan yang terdiri dari: (1) Sub Urusan Pendaftaran Penduduk yaitu pelayanan pendaftaran penduduk; (2) Sub Urusan Pencatatan Sipil yaitu pelayanan pencatatan sipil; (3) Sub Urusan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yaitu pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan daerah; dan (4) Sub Urusan Profile Kependudukan yaitu penyusunan profile kependudukan daerah. Sedangkan fungsi Disdukcapil adalah (1) Perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran kependudukan, pelayanan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data; (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran kependudukan, pelayanan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data; (3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran kependudukan, pelayanan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data; (4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Evaluasi penilaian kinerja Disdukcapil Kabupaten Pemalang berdasar Renstra Tahun 2021-2026 dapat dilihat dari :

- a. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan
- b. Cakupan layanan administrasi kependudukan
- c. SAKIP
- d. IRB
- e. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan
- f. Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil
- g. Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama
- h. Persentase data kependudukan yang mutakhir

Pada Tahun 2023, IKM terhadap layanan administrasi kependudukan sebesar 87,06 kategori B (baik) yang dicapai dari rerata nilai Semester I yaitu 83,83 % dan Semester II 90,28 %. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Semester I dilaksanakan pada Bulan Mei dan Juni, sedangkan untuk Semester II dilaksanakan pada Bulan Nopember dan Desember Tahun 2023. Walaupun sudah dinilai baik, kualitas pelayanan Disdukcapil Kabupaten Pemalang harus terus ditingkatkan. Pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan Disdukcapil Kabupaten Pemalang berupa layanan dokumen kependudukan, dokumen pencatatan sipil, pemanfaatan data kependudukan, penyediaan data serta informasi kependudukan. Adapun untuk capaian cakupan layanan administrasi kependudukan tersebut sebesar 84,92%. Layanan yang masih harus diperhatikan adalah layanan dokumen kependudukan, dokumen pencatatan sipil dan pemanfaatan data kependudukan. Dokumen kependudukan yang wajib dimiliki adalah KTP, KK dan KIA. Kepemilikan KIA sudah mencapai target yang ditentukan dari 35 menjadi 51,38 % dengan capaian diatas 100% sedangkan target nasional 50%, hal ini dikarenakan adanya kerja sama dengan sekolah-sekolah dari tingkat pendidikan TK sampai dengan SMP. Kepemilikan akte kelahiran target nasional 98% realisasi 98,22%. Persentase OPD yang telah

memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama sudah mencapai 100 % dari target Tahun 2023 sebesar 56,41 . Bagi OPD yang telah melakukan perjanjian kerjasama akan diberikan hak akses, karena harus memenuhi persyaratan, meliputi tersedianya jaringan tertutup (VPN). Tahun 2023 OPD yang telah melakukan kerjasama sebanyak 22 (Dua puluh dua ) melebihi target nasional sebanyak 15 (lima belas). Adapun OPD yang telah melakukan kerjasama yaitu Diskominfo, BKD, Bapenda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinsos KBPP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bappeda, Kecamatan Pematang, Diskoperindag, Dinas Tenaga Kerja, Kesbangpol, Kecamatan Taman, RSUD M Ashari dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa , Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, DPU TR, Satpol PP, Dinpusarda, BPBD

Untuk indikator kesekretariatan terdiri dari nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Pada Tahun 2023, Disdukcapil Kabupaten Pematang mendapat nilai SAKIP sebesar 63,70 (kategori B), sedangkan IRB sebesar 0 % (tahun 2023 tidak mengeluarkan IRB). Adapun hal-hal yang menjadi tantangan untuk meningkatkan nilai SAKIP dan IRB adalah :

- a. Perlu ada *reward* dan *punishment* sebagai stimulant SDM Disdukcapil Kabupaten Pematang untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya;
- b. Menjadikan hasil SAKIP dan IRB sebagai rekomendasi perbaikan program, kegiatan dan sub kegiatan internal ;
- c. Menjadikan pengendalian dan evaluasi internal sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, Disdukcapil Kabupaten Pematang perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Disdukcapil Kabupaten Pematang untuk mendukung pencapaian

target dan sasaran RPJMD tahun 2021-2026, Adapun permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan untuk kebutuhan pelayanan publik lainnya.
2. Pemanfaatan dokumen kependudukan digital masih belum digunakan secara menyeluruh oleh lembaga pengguna.
3. Adanya kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang belum optimal.
4. Data dukung untuk penyusunan Buku Profil Kependudukan masih belum terupdate oleh OPD terkait pada saat dead line.
5. Masih rendahnya OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama

Sedangkan hambatan yang dihadapi adalah sbb :

1. Pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan untuk kebutuhan pelayanan publik lainnya sejak dini masih kurang dan kecenderungan masyarakat akan mengurus dokumen kependudukan hanya pada saat akan diperluakn.
2. Kebijakan pemanfaatan dokumen digital oleh lembaga pengguna belum diterapkan secara implementatif dalam pelayanan publik.
3. Kepemilikan smartphone sebagian besar hanya dimiliki dan dipahami oleh kalangan milineal.
4. Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam mendukung pemenuhan kelengkapan data dukung profil kependudukan
5. Belum semua OPD berkepentingan dalam pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK

Dalam menjawab permasalahan, faktor penghambat dalam pelaksanaan tupoksi Disdukcapil Kabupaten Pemalang justru harus dipandang sebagai tantangan dalam menjalankan fungsinya dengan



mengoptimalkan segala kelebihan dan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2023 adalah:

**“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”**

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

**Adil**

Adil merupakan keadaan/kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

**Makmur**

Makmur merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.

**Agamis**

Agamis merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.

**Ngangeni**

Ngangeni merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau.

Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. *“Pemalang itu ngangeni”*.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong-royong;
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 tersebut ditetapkan 4 (empat) program unggulan, yaitu :

1. Desa Wisata (Dewi)

Merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki masing-masing desa. Adapun variannya sangat luas mencakup wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan dengan menampung kreatifitas dan inovasi masyarakat.

2. Desa Sinergi (Desi)

Merupakan upaya peningkatan sinergitas antar desa, antara pemerintah desa dengan kecamatan dan kabupaten khususnya kolaborasi dan sinergitas penyelenggaraan program pemerintah

dan pemerintah daerah yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat sehingga lebih meningkatkan akurasi capaiannya.

3. Desa Digital (Dedi)

Merupakan upaya peningkatan transformasi digital di tingkat desa dalam pelayanan informasi kepada masyarakat dan peningkatan administrasi desa secara digital, beserta peningkatan kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Kota Industri (Koin)

Merupakan upaya peningkatan investasi perindustrian sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah, dilakukan dengan penguatan kawasan peruntukan industri yang diarahkan berkembang menjadi kawasan industri beserta kemudahan dalam informasi, pelayanan perijinan dan pemberian insentif.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, maka Disdukcapil Kabupaten Pemalang mendukung misi kedua yaitu : **“Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”** yang dicapai melalui tujuan daerah berupa mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Dalam mencapai reformasi birokrasi yang efektif dan efisien ditentukan sasaran daerah berupa : (1) meningkatnya birokrasi akuntabel, (2) meningkatnya birokrasi kapabel; dan (3) meningkatnya pelayanan publik yang prima. Disdukcapil Kabupaten Pemalang mendukung tercapainya sasaran daerah meningkatnya pelayanan publik yang prima dengan indikator kinerja rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Berkaitan dengan program unggulan Kabupaten Pemalang, maka Disdukcapil Kabupaten Pemalang mendukung program unggulan Desa Digital (Dedi) dan Desa Sinergi (Desi). Dukungan terhadap Dedi diwujudkan melalui fasilitasi pelayanan online melalui aplikasi Lakone (Layanan Adminduk Online) dengan pemberian akun

khusus. Sedangkan dukungan terhadap Desi diwujudkan dengan fasilitasi mobil pelayanan adminduk di desa/kelurahan dengan sistem jemput bola.

Disesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dan kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD tahun 2024 – 2026 diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”**, maka kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2025, diarahkan pada **“Percepatan pembangunan melalui penguatan kualitas SDM, infrastruktur, inovasi dan teknologi untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah”**, dengan prioritas pembangunan meliputi :

- a. Peningkatan Implementasi *Smart City*.
- b. Peningkatan Reformasi Birokrasi.
- c. Peningkatan Produktivitas Ekonomi yang Berkualitas dan Berbasis Tehnologi.
- d. Penguatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pengembangan Pembangunan Desa.
- e. Perlindungan, Pengembangan dan Reaktualisasi Nilai Budaya Daerah.
- f. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Secara Berkelanjutan.
- g. Penanganan Kemiskinan melalui Pemenuhan Pelayanan Dasar.
- h. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.

Disdukcapil mendukung prioritas pembangunan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan system perencanaan pembangunan dan peningkatan

kualitas sumber daya aparatur pemerintah, yaitu dengan meningkatkan pelayanan Disdukcapil yang prima.

Hal-hal yang mempengaruhi dalam penentuan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan yang dilaksanakan Disdukcapil Kabupaten Pematang Jaya adalah :

1. Terbitnya peraturan baru terkait perencanaan penganggaran :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengakibatkan adanya perubahan pada nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan system e-planning dan e-budgeting.

2. Terbitnya peraturan baru terkait administrasi kependudukan :

- 1) Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring ;
- 2) Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
- 3) Permendari Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

- 4) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
- 5) Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital
- 6) Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan
- 7) Peraturan Bupati Pematang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) di Kabupaten Pematang

Mengakibatkan bertambahnya tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh Disdukcapil Kabupaten Pematang.

Dalam rangka menghadapi dinamika tersebut, maka hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Pematang ke depan adalah :

1. Membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa sehingga sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan kewenangan masing-masing;
2. Membangun kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholder terkait seperti perangkat daerah kabupaten, instansi vertikal dan masyarakat dalam rangka penjaringan masalah dan masukan serta inspirasi kreatif dalam rangka menyusun rencana pembangunan ke depan;
3. Meningkatkan kompetensi SDM agar optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
4. Keandalan layanan on line adminduk perlu diperkuat.

Disdukcapil Kabupaten Pematang merupakan OPD pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan yang tentunya berhubungan langsung dengan masyarakat, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang dan Pemerintah

Desa/Kelurahan serta lembaga/instansi lainnya seperti rumah sakit, puskesmas, BPJS, bank dan sebagainya. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang dihadapi. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan adminduk adalah sebagai berikut :

- 1) Pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan untuk kebutuhan pelayanan publik lainnya sejak dini masih kurang dan kecenderungan masyarakat akan mengurus dokumen kependudukan hanya pada saat akan diperlukan.
- 2) Kebijakan pemanfaatan dokumen digital oleh lembaga pengguna belum diterapkan secara implementatif dalam pelayanan publik.
- 3) Kepemilikan smartphone sebagian besar hanya dimiliki dan dipahami oleh kalangan milenial.
- 4) Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam mendukung pemenuhan kelengkapan data dukung profil kependudukan
- 5) Belum semua OPD berkepentingan dalam pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Disdukcatpil Kabupaten Pematang adalah sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan kependudukan yang adaptif terhadap perkembangan tuntutan masyarakat;

2. Adanya kebijakan dari pemerintah pusat terhadap Identitas Kependudukan yang bisa digunakan untuk layanan kepentingan lainnya.
3. Kepemilikan KTP fisik masih berlaku;
4. Pelaksanaan Rapat Koordinasi secara intensif.
5. Membangun kerjasama dalam pemanfaatan NIK untuk kepentingan layanan publik dan kegiatan lainnya.

Hasil analisis terhadap gambaran kinerja pelayanan Disdukcapil Kabupaten Pemalang, telaah visi misi dan program prioritas Bupati, permasalahan dan hambatan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan **isu-isu strategis** Disdukcapil Kabupaten Pemalang yaitu

1. Bagi OPD yang menggunakan hak akses dalam pemanfaatan data kependudukan, diwajibkan sudah memiliki standar ISO 27001.
2. Implementasi identitas kependudukan digital (IKD) sesuai Permendagri Nomor 72 Tahun 2022.
3. Penerapan Buku Pokok Pemakaman dalam peningkatan akta kematian.
4. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak usia 0 - 17 Tahun kurang 1 hari.

Untuk menjawab isu strategis tersebut maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Lembaga/ OPD yang menggunakan hak akses dalam pemanfaatan data kependudukan/ melakukan kerjasama mempunyai standar ISO 27001.
2. Sosialisasi dan implementasi pemanfaatan identitas kependudukan digital (IKD)
3. Setiap desa/ kelurahan/ tempat pemakaman umum mempunyai Buku Pokok Kematian.
4. Cakupan kepemilikan KIA dan pemanfaatannya.



#### **2.4. Review terhadap RKPD Tahun 2024**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sebagai dasar dalam penyusunan Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang. Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang disusun dengan berpedoman pada RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan obyektif Disdukcapil Kabupaten Pemalang dengan mempertimbangkan faktor 5M yaitu *Man* (Manusia), *Money* (Dana), *Machine* (Sarpras), *Method* (Tupoksi dan Tata Laksana), dan *Material* (Bahan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam matrik RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 perlu disesuaikan dengan tupoksi dan kebutuhan Disdukcapil Kabupaten Pemalang.

**Tabel 2.3**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					9,180,634,000		9,180,634,000	
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	59 skor	6,114,681,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	59 skor	6,114,681,000	
				Nilai Indeks Reformasi Birokrasi		76 skor	1,853,285,800	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi		76 skor	1,853,285,800		
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	11 dokumen	8,250,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	11 dokumen	8,250,000
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	1,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	1,000,000
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 dokumen	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 dokumen	1,000,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		
							RKA-SKPD				RKA-SKPD				
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1,500,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1,500,000	
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1,500,000	
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	750,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	750,000	
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	1,500,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	1,500,000	
2	12	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun</b>	<b>14 dokumen</b>	<b>6,106,431,000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Pemalang</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun</b>	<b>14 dokumen</b>	<b>6,106,431,000</b>	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang/ 14 bulan	6,105,531,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pemalang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang/ 14 bulan	6,105,531,000	
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	300,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	300,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	300,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	300,000	
2	12	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	3,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	3,000,000	
2	12	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah pegawai yang meningkat kapasitasnya</b>	<b>84 orang</b>	<b>257,223,000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Pemalang</b>	<b>Jumlah pegawai yang meningkat kapasitasnya</b>	<b>84 orang</b>	<b>21,694,000</b>	
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	84 orang	21,694,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Pemalang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	84 orang	21,694,000	
2	12	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia</b>	<b>7 layanan</b>	<b>369,768,000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Pemalang</b>	<b>Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia</b>	<b>7 layanan</b>	<b>369,768,000</b>	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	7,296,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pemalang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	7,296,000	
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	10,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pemalang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	10,000,000	
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	2,570,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Pemalang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	2,570,000	
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 paket	260,182,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Pemalang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 paket	260,182,000	
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	9,190,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Pemalang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	9,190,000	
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	2 dokumen	6,120,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	2 dokumen	6,120,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			Undangan yang Disediakan					Undangan yang Disediakan							
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 laporan	74,410,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 laporan	74,410,000	
2	12	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia</b>	<b>25 unit</b>	<b>61,730,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kabupaten Pemalang	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia</b>	<b>25 unit</b>	<b>61,730,000</b>	
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 unit	11,730,000	Pengadaan Mebel	Kabupaten Pemalang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 unit	11,730,000	
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	35,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pemalang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	35,000,000	
2	12	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	15,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Pemalang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	15,000,000	
2	12	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>72 laporan</b>	<b>1,226,406,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kabupaten Pemalang</b>	<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>72 laporan</b>	<b>1,226,406,000</b>	
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	5,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	5,000,000	
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	241,540,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	241,540,000	
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	979,866,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	979,866,000	
2	12	01	2.08		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah barang milik daerah yang penunjang urusan pemerintah daerah terpelihara</b>	<b>115 unit</b>	<b>173,687,800</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kabupaten Pemalang</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang penunjang urusan pemerintah daerah terpelihara</b>	<b>115 unit</b>	<b>173,687,800</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting								
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12						
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 unit	68,889,800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Pemalang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 unit	68,889,800					
2	12	01	2.08	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dipelihara	1 unit	2,500,000	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Pemalang	Jumlah mebel yang dipelihara	1 unit	2,500,000					
2	12	01	2.08	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 unit	50,546,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pemalang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 unit	50,546,000					
2	12	01	2.08	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		umlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	50,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Pemalang	umlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	50,000,000					
2	12	01	2.08	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 unit	4,752,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Pemalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 unit	4,752,000					
2	12	02			<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>		<b>Persentase kepemilikan dokumen kependudukan</b>	<b>79.50%</b>	<b>587,978,000</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>		<b>Persentase kepemilikan dokumen kependudukan</b>	<b>79.50%</b>	<b>587,978,000</b>					
2	12	02	2.01		<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>		<b>Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan</b>	<b>74.412 dokumen</b>	<b>539,878,000</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Kabupaten Pemalang</b>	<b>Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan</b>	<b>74.412 dokumen</b>	<b>539,878,000</b>					
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	60.000 dokumen	10,375,000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	60.000 dokumen	10,375,000					
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 laporan	494,129,000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 laporan	494,129,000					
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	14.400 dokumen	35,374,000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	14.400 dokumen	35,374,000					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		
2	12	02	2.02		<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>		<b>Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang disediakan</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>10,000,000</b>	<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Kabupaten Pemalang</b>	<b>Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang disediakan</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>10,000,000</b>	
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan		umlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	1 dokumen	10,000,000	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Kabupaten Pemalang	umlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	1 dokumen	10,000,000	
2	12	02	2.03		<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>		<b>Jumlah dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang disediakan</b>	<b>2.500 dokumen</b>	<b>38,100,000</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Kabupaten Pemalang</b>	<b>Jumlah dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang disediakan</b>	<b>2.500 dokumen</b>	<b>38,100,000</b>	
2	12	02	2.03	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	2.500 dokumen	38,100,000	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Masyarakat Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	2.500 dokumen	38,100,000	
2	12	03			<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>		<b>Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil</b>	<b>98.50%</b>	<b>125,658,000</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>		<b>Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil</b>	<b>98.50%</b>	<b>125,658,000</b>	
2	12	03	2.01		<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>		<b>Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan</b>	<b>32.002 dokumen</b>	<b>125,658,000</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Masyarakat Kabupaten Pemalang</b>	<b>Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan</b>	<b>32.002 dokumen</b>	<b>125,658,000</b>	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	32.000 dokumen	30,709,000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Masyarakat Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	32.000 dokumen	30,709,000	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2 layanan	94,949,000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Masyarakat Kabupaten Pemalang	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2 layanan	94,949,000	
2	12	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>		<b>Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama</b>	<b>71.79%</b>	<b>450,801,000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>		<b>Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama</b>	<b>71.79%</b>	<b>450,801,000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting								
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1					2	3	4	5	6	7					8	9	10	11	12
2	12	04	2.01		<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>		<b>Jumlah dokumen pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan</b>	<b>18 dokumen</b>	<b>37,948,000</b>	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>Perangkat Daerah Kab. Pemalang</b>	<b>Jumlah dokumen pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan</b>	<b>18 dokumen</b>	<b>37,948,000</b>					
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 dokumen	22,470,000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Perangkat Daerah Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 dokumen	22,470,000					
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	6 dokumen	15,478,000	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Perangkat Daerah Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	6 dokumen	15,478,000					
2	12	04	2.02		<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>		<b>Jumlah dokumen penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang disusun</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>7,500,000</b>	<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Perangkat Daerah Kab. Pemalang</b>	<b>Jumlah dokumen penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang disusun</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>7,500,000</b>					
2	12	04	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 dokumen	7,500,000	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Perangkat Daerah Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 dokumen	7,500,000					
2	12	04	2.03		<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>		<b>Jumlah laporan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang disusun</b>	<b>27 laporan</b>	<b>405,353,000</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>		<b>Jumlah laporan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang disusun</b>	<b>27 laporan</b>	<b>405,353,000</b>					



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		
2	12	04	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 laporan	13,100,000	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Perangkat Daerah Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 laporan	13,100,000	
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		umlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	317,577,000	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Perangkat Daerah Kab. Pemalang	umlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	317,577,000	
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8 laporan	67,176,000	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Masyarakat Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8 laporan	67,176,000	
2	12	04	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 laporan	7,500,000	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Masyarakat Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 laporan	7,500,000	
2	12	05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>		<b>Persentase Data Kependudukan yang mutakhir</b>	<b>95%</b>	<b>48,250,000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>		<b>Persentase Data Kependudukan yang mutakhir</b>	<b>95%</b>	<b>48,250,000</b>	
2	12	05	2.01		<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>		<b>Jumlah dokumen profil kependudukan yang disusun</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>48,250,000</b>	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>Masyarakat Kabupaten Pemalang</b>	<b>Jumlah dokumen profil kependudukan yang disusun</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>48,250,000</b>	
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota		Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 dokumen	42,500,000	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Masyarakat Kabupaten Pemalang	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 dokumen	42,500,000	
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang disusun	1 dokumen	7,500,000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Masyarakat Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang disusun	1 dokumen	7,500,000	



## **2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat**

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismenya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*. Mekanisme secara *top down* yaitu melalui Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD, sedangkan mekanisme secara *bottom up* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah. Selain hasil Forum PD dan Musrenbangkab, usulan masyarakat lainnya dapat berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan reses.

Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tidak mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan usulan dari masyarakat.

Tabel 2.4

Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku  
Kepentingan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan (Ranking)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN DISDUKCATPIL**  
**KABUPATEN PEMALANG**

**3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Renja Disdukcatpil Kabupaten Pemalang Tahun 2025 sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Tema RPJMN Tehnokratik 2025 – 2029 meliputi Transformasi sosial, Transformasi ekonomi, Transformasi tata kelola, Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Sedangkan untuk Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah **“Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”**, yang diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan, meliputi :

1. Sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan menciptakan produk – produk yang ramah lingkungan

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 -2026 diarahkan pada **“Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan didukung dengan sumber daya manusia**

**yang berdaya saing dan lebih berkarakter”**, yang dijabarkan dalam empat prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta provinsi dan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 yang merupakan tahun keempat RPJMD, maka arah kebijakan pembangunan tersebut diarahkan pada **“Percepatan pembangunan melalui penguatan kualitas SDM, infrastruktur, inovasi dan teknologi untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah”** dengan prioritas sebagai berikut :

- a. Peningkatan Implementasi *Smart City*.
- b. Peningkatan Reformasi Birokrasi.
- c. Peningkatan Produktivitas Ekonomi yang Berkualitas dan Berbasis Tehnologi.
- d. Penguatan Fasilitas, Koordinasi dan Pengembangan Pembangunan Desa.
- e. Perlindungan, Pengembangan dan Reaktualisasi Nilai Budaya Daerah.
- f. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Secara Berkelanjutan.
- g. Penanganan Kemiskinan melalui Pemenuhan Pelayanan Dasar.
- h. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.

Berkaitan dengan prioritas pembangunan Tahun 2025 Kabupaten Pemalang tersebut, Disdukcapil Kabupaten Pemalang mendukung

prioritas ke-4 yaitu Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif pelayanan kepada masyarakat yang lebih murah, mudah, cepat, transparan dan terjangkau utamanya untuk mendukung kemudahan investasi dan pelayanan dasar dengan memanfaatkan teknologi informasi yang didekatkan kepada masyarakat.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang**

Disdukcapil Kabupaten Pemalang dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan mampu bersaing di bidang administrasi kependudukan, maka Disdukcapil Kabupaten Pemalang harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan komprehensif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang administrasi kependudukan, Disdukcapil Kabupaten Pemalang secara proaktif berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan publik yang prima.

#### **A. Tujuan**

Disdukcapil Kabupaten Pemalang mempunyai tujuan jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2021–2026, yaitu **“Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang prima”** yang diukur dengan indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan administrasi kependudukan** yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat

## B. Sasaran

Disdukcapil Kabupaten Pemalang mempunyai sasaran jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2021–2026, yaitu **“Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan”** yang diukur dengan indikator **Cakupan layanan administrasi kependudukan** dengan rumusan Rerata dari persentase kepemilikan dokumen kependudukan, persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil, persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama, dan persentase data kependudukan yang mutakhir.

Rumusan tujuan dan sasaran Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang Tahun 2025 dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Disdukcapil Kabupaten Pemalang  
Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang prima		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	%	82
2		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	90,75

### 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.



Pada Tahun 2025, Disdukcapil Kabupaten Pemalang merencanakan sebanyak 5 program, 15 kegiatan dan 44 sub kegiatan yang pelaksanaannya mencakup di seluruh wilayah Disdukcapil Kabupaten Pemalang dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 8.563.043.000,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Puluh tiga Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Terdapat beberapa perbedaan jenis kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif rumusan Renja dibandingkan dengan rancangan RKPD, hal ini disebabkan adanya penyesuaian dengan kebutuhan.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISDUKCATPIL KABUPATEN PEMALANG**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk Tahun 2025. Adapun rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Disdukcatpil Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

#### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  - 6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
  - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 3) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
  - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

## B. Program Pendaftaran Penduduk

### 1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- 1) Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
- 2) Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- 3) Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

### 2. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan

### 3. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

- 1) Sub Kegiatan Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk.

## C. Program Pencatatan Sipil

### 1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil

- 1) Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
- 2) Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil.

## D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

### 1. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

- 1) Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
- 2) Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

### 2. Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

### 3. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 3) Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 4) Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat.

### E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

#### 1. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
- 2) Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

Tabel 4.1  
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Disdukcatpil Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Sub Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							8,563,043,000						9,326,703,800
2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA							7,350,160,000	7.350.160.00			8.094.366.80		8,094,366,800
2 12 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							8,500,000						9,250,000
2 12 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SAKIP IRB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	59 Skor 76 Skor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		dokumen 2	1,100,000	
2 12 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	SAKIP IRB	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	59 Skor 76 Skor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		dokumen 1	1,100,000	
2 12 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	SAKIP IRB	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	59 Skor 76 Skor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		dokumen 1	1,100,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Sub Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2 12 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	SAKIP IRB	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	59 Skor 76 Skor	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		dokumen	1	1,600,000
2 12 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	SAKIP IRB	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	59 Skor 76 Skor	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		dokumen	1	1,600,000
2 12 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SAKIP IRB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	59 Skor 76 Skor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		dokumen	1	1,000,000
2 12 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP IRB	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	59 Skor 76 Skor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		dokumen	3	1,750,000
<b>2 12 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>5,397,177,000</b>	<b>5.396.177.000</b>				<b>6,206,731,000</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Sub Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2 12 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SAKIP IRB	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	59 Skor 76 Skor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang/bulan	5,396,177,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		orang/bulan	34	6,205,531,000
2 12 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SAKIP IRB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	59 Skor 76 Skor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum)		dokumen	1	400,000
2 12 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SAKIP IRB	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	59 Skor 76 Skor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 dokumen	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		dokumen	12	400,000
2 12 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	SAKIP IRB	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	59 Skor 76 Skor	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum)		dokumen	1	400,000
<b>2 12 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>21,264,000</b>					<b>21.794,000</b>



Kode	Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Sub Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2 12 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SAKIP IRB	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang meningkatkan kapasitasnya	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	59 Skor 76 Skor	Jumlah pegawai yang meningkat kapasitasnya	84 orang	21,264,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum)		Orang	84	21.794,000
<b>2 12 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>391,311,000</b>					<b>372,268,000</b>
2 12 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SAKIP IRB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	59 Skor 76 Skor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	7,296,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum)		paket	3	7,396,000
2 12 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SAKIP IRB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	59 Skor 76 Skor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	10,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum)		paket	5	10,100,000
2 12 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SAKIP IRB	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	59 Skor 76 Skor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	2,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum)		paket	6	2,670,000
2 12 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SAKIP IRB	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	59 Skor 76 Skor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 paket	260,182,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum)		paket	13	261,182,000
2 12 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SAKIP IRB	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	59 Skor 76 Skor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	9,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum)		paket	10	9,290,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Sub Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2 12 01 2.06 06	Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan	SAKIP IRB	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	59 Skor 76 Skor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	6,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		dokumen	2	6,220,000
2 12 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SAKIP IRB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	59 Skor 76 Skor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 laporan	95,453,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		laporan	28	75,410,000
<b>2 12 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>128,000,000</b>					<b>69,330,000</b>
2 12 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	SAKIP IRB	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	59 Skor 76 Skor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 unit	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		unit	24	11,830,000
2 12 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SAKIP IRB	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	59 Skor 76 Skor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	105,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		unit	2	40,000,000
2 12 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SAKIP IRB	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	59 Skor 76 Skor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		unit	2	17,500,000
<b>2 12 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>1,230,420,000</b>					<b>1,236,706,000</b>
2 12 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SAKIP IRB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	59 Skor 76 Skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	4,994,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		laporan	12	5,100,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Sub Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2 12 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SAKIP IRB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	59 Skor 76 Skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	244,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		laporan	48	251,640,000
2 12 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SAKIP IRB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	59 Skor 76 Skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	981,426,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		laporan	12	979,966,000
<b>2 12 01 2.08</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>173,588,000</b>					<b>178,287,800</b>
2 12 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SAKIP IRB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	59 Skor 76 Skor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 unit	87,856,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		unit	36	87,856,400
2 12 01 2.08 05	Pemeliharaan Mebel	SAKIP IRB	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	59 Skor 76 Skor	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		unit	1	3,000,000
2 12 01 2.08 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SAKIP IRB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	59 Skor 76 Skor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 unit	50,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		unit	66	51,546,000
2 12 01 2.08 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SAKIP IRB	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	59 Skor 76 Skor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 unit	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		unit	1	52,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Sub Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2 12 01 2.08 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SAKIP IRB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	59 Skor 76 Skor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 unit	4,752,000	Dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		unit	12	4,852,000
<b>2 12 02</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>						<b>588,617,000</b>			<b>594,978,000</b>				
<b>2 12 02 2.01</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>						<b>539,598,000</b>			<b>542,878,000</b>				
2 12 02 2.01 02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	79,50%	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	60.000 dokumen	10.231.000	Dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		dokumen	60.000	11.375.000
2 12 02 2.01 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	79,50%	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 laporan	494,129,000	Dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Laporan	12	495,129,000
2 12 02 2.01 05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	79,50%	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	14.400 dokumen	35,235,000	Dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dokumen	14.400	36,374,000
<b>2 12 02 2.02</b>	<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>						<b>11,000,000</b>			<b>12,000,000</b>				
2 12 02 2.02 02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Jenis blangko dokumen kependudukan yang tersedia	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	79,50%	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 dokumen	11,000,000	Dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		dokumen	1	12,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Sub Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2 12 02 2.03	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>					38,022,000							40,100,000	
2 12 02 2.03 02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang tersedia	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	79,50%	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	2500 dokumen	38,022,000	Dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		dokumen	2500	40,100,000
2 12 03	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>					125,608,000							127,658,000	
2 12 03 2.01	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>					125,608,000							127,658,000	
2 12 03 2.01 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	98,5%	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	32.002 dokumen	30,709,000	Dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		dokumen	32.000	31,709,000
2 12 03 2.01 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	98,5%	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2 layanan	94,899,000	Dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		layanan	2	95,949,000
2 12 04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>					450,455,000							458,701,000	
2 12 04 2.01	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>					37,948,000							39,948,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Sub Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2 12 04 2.01 01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah Dokumen Data yang Diolah dan Disajikan	Jumlah OPD pemanfaat data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	71,79%	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 laporan	22,470,000	Dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		laporan	12	23,470,000
2 12 04 2.01 02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD pemanfaat data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	71,79%	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	6 dokumen	15,478,000	Dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		dokumen	6	16,478,000
<b>2 12 04 2.02</b>	<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>								<b>7,500,000</b>					<b>8,500,000</b>
2 12 04 2.02 01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Jumlah peraturan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang diimplementasikan	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	71,79%	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 dokumen	7,500,000	Dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		dokumen	1	8,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Sub Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2 12 04 2.03	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>					405,007,000						410,253,000		
2 12 04 2.03 01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jenis data kependudukan yang terkelola	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	71,79%	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 laporan	13,072,000	Dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum)		laporan	6	14,000,000
2 12 04 2.03 03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jenis data kependudukan yang terkelola	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	71,79%	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	317,415,000	Dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		laporan	12	319,577,000
2 12 04 2.03 05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jenis data kependudukan yang terkelola	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	71,79%	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8 laporan	67,020,000	Dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum)		laporan	18	68,176,000
2 12 04 2.03 07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jenis data kependudukan yang terkelola	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	71,79%	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 laporan	7,500,000	Dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		laporan	1	8,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Sub Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2 12 05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>					48,203,000								51,000,000
2 12 05 2.01	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>					48,203,000								51,000,000
2 12 05 2.01 01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Persentase Data Kependudukan yang mutakhir	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun yang tersaji	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	95%	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 dokumen	42,560,000	Dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		dokumen	1	45,000,000
2 12 05 2.01 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Persentase Data Kependudukan yang mutakhir	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang disusun	Jumlah data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun yang tersaji	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	95%	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang disusun	1 dokumen	5,643,000	Dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		dokumen	1	6,000,000



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian**

Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2025 ini adalah :

1. Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Renstra Disdukcapil Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2025.
2. Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih **indikatif** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/ anggaran yang tersedia.

#### **5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD-Renstra OPD dan Renja Tahunan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Disdukcapil Kabupaten Pemalang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
  - a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
  - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

### 5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan tersusunnya Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKA maupun DPA untuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang Tahun 2025 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang Tahun 2025 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang Tahun 2025.

Kepala Dinas Kependudukan  
Dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Pemalang



Drs. HENDRO SUSILO, M.AP  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681227 199001 1 002



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 050.23/182 A /TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Daerah Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengkaji dan mengevaluasi Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2024 termasuk capaian kinerja dan kemajuannya;
  - b. mempelajari visi, misi strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah;
  - c. mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
  - d. melakukan diskusi untuk memperoleh masukan data yang diperlukan antar bidang dan sekretariat sebagai bahan penyusunan;
  - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait dalam proses penyusunan agar sesuai dengan arahan Rencana Strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026; dan
  - f. menyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2025.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang  
tanggal

BUPATI PEMALANG,



MANSUR HIDAYAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 050.23/ / TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
PEMALANG TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	Penanggung jawab	
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	Ketua	
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang		
5.	Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	Anggota	
6.	Plt. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	Anggota	
7.	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	Anggota	Rubed Hastono., S.H.
8.	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	Anggota	Maksudi, S.E., M.Si.

9.	Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	Anggota	Mono Setiawan,S.Sos.
10	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	Anggota	

BUPATI PEMALANG



MANSUR HIDAYAT